

**DANA DESA DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDEKS DESA  
MEMBANGUN DI KABUPATEN PESAWARAN**

**(Tesis)**

**Oleh**

**KIKI AMBARWATI  
NPM 1920021002**



**PROGRAM STUDI ILMU PENYULUHAN  
PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**DANA DESA DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDEKS DESA  
MEMBANGUN DI KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh**

**Kiki Ambarwati**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/  
Pemberdayaan Masyarakat  
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU PENYULUHAN  
PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **DANA DESA DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh  
Kiki Ambarwati**

Keberadaan dana desa bukan merupakan “bantuan” dari Pemerintah kepada desa, melainkan “kewajiban atau mandat” dari Undang-Undang berupa distribusi uang negara untuk menjalankan kewenangan desa. Dana desa membuktikan mampu menggerakkan perubahan di desa yang digambarkan dengan naiknya tingkat kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, menganalisis pengaruh antara dana desa dengan angka indeks desa membangun, serta menganalisis tantangan dan kendala pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan secara survei pada 12 desa di Kabupaten Pesawaran menggunakan analisis deskriptif dan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa lebih besar digunakan untuk kegiatan pembangunan secara fisik dan belum berfokus pada kegiatan pembangunan masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa adalah kinerja aparat, keadaan geografis desa, dan prinsip transparansi. Adanya dana desa berpengaruh terhadap peningkatan indeks desa membangun. Kendala dalam pengelolaan dana desa di berbagai tingkat desa adalah jumlah dana yang turun secara berkala menyebabkan keterlambatan kegiatan. Sulitnya menggerakkan masyarakat, tentu menjadi tantangan baik untuk aparat desa hingga tingkat pemerintah.

Kata kunci: dana, desa, pembangunan.

## **ABSTRACT**

### **VILLAGE FUNDS AND THEIR EFFECT ON VILLAGE INDEX BUILDING IN PESAWARAN DISTRICT**

**By  
Kiki Ambarwati**

The existence of village funds is not an "assistance" from the government to the village, but an "obligation or mandate" from the law in the form of distributing state money to carry out village authority. Village funds have proven to be able to drive change in the village which is illustrated by the increasing level of village independence. This study aims to analyze the use of village funds, analyze the factors that influence the management of village funds, analyze the influence between village funds and the index number of developing villages, and analyze the challenges and constraints of managing village funds. The research was conducted in a survey in 12 villages in Pesawaran Regency using descriptive analysis and regression testing. The results of the study indicate that the larger village funds are used for physical development activities and have not focused on local resource-based community development activities. The factors that influence the success of village fund management are the performance of the apparatus, the geographical situation of the village, and the principle of transparency. The existence of village funds has an effect on increasing the index of developing villages. The obstacle in managing village funds at various village levels is the amount of funds that decreases periodically causing delays in activities. The difficulty of mobilizing the community is certainly a challenge for both village officials and the government level.

Keywords: development, fund, village.



**Judul Tesis : DANA DESA DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN  
DI KABUPATEN PESAWARAN**

**Nama Mahasiswa : Kiki Ambarwati**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1920021002**

**Program Studi : Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/  
Pemberdayaan Masyarakat**

**Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin**



**Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.**  
NIP 19581111 198603 1 004

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

**Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.**  
NIP 19800723 200501 2 002

**2. Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan/  
Pemberdayaan Masyarakat**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by the name 'Hasanuddin'.

**Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.**  
NIP 19590321 198503 1 016



**MENGESAHKAN**

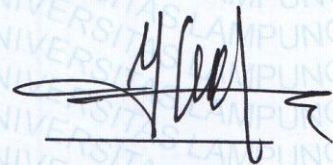
**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.**

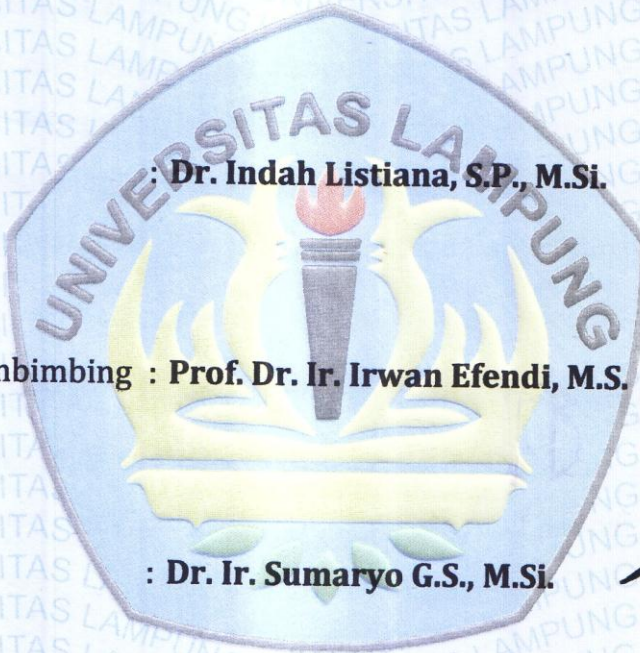


**Sekretaris : Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Irwan Efendi, M.S.**



**Anggota : Dr. Ir. Sumaryo G.S., M.Si.**



**2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T, M.T.**  
NIP 19710415 199803 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 14 Oktober 2022**



## PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Pesawaran**" adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam kademik atau yang sering disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



Kiki Ambarwati  
NPM 1920021002

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Way Jepara pada tanggal 28 April 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Amrul Karya dan Ibu Sukiyati. Penulis menyelesaikan studi di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi I Sumberejo Way Jepara pada tahun 2002, tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri I Labuhan Ratu II pada tahun 2008, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri I Way Jepara pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri I Way jepara pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri Lokal (UML) dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Multidisiplin Universitas Lampung melalui jalur Beasiswa Kerjasama. Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul “Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Pesawaran



## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dari segala nikmat-Nya, kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Amrul Karya dan Ibunda Sukiyati.

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, hidayah, serta nikmat yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Pesawaran**”. Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Magister pada Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Multidisiplin Universitas Lampung.

Dalam penyusunan tesis ini, Penulis banyak mendapat bantuan baik ilmu, petunjuk, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T, M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu kepada Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan .
3. Bapak Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S. selaku Pembimbing Pertama atas motivasi, bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan
4. Ibu Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si. selaku Pembimbing Kedua atas motivasi, bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Efendi, M.S. selaku Dosen Pembahas Pertama atas arahan dan masukan yang telah diberikan untuk menyempurnakan tesis ini.



6. Bapak Dr. Ir. Sumaryo G.S., M.Si. selaku Dosen Pembahas Kedua atas arahan dan masukan yang diberikan untuk menyempurnakan tesis ini.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, semangat, dan dukungan kepada Penulis.
8. Seluruh tenaga pendidik dan karyawan Pascasarjana Universitas Lampung atas bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.
9. Ade Yulistiani, S.P., Gietha Putri Aroem, S.P., M.Si., Anita Florency, S.Sos.,M.Si., atas kebersamaan, dukungan, serta bantuan yang diberikan kepada Penulis.
10. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis dalam penyusunan tesis ini.

Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis,

***Kiki Ambarwati***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b> .....	8
A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Desa .....	8
2. Dana Desa.....	9
3. Pendapatan Asli Daerah.....	11
4. Indeks Desa Membangun .....	12
5. Pembangunan Desa .....	15
6. Faktor-Faktor Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.....	17
7. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Pemikiran .....	30
C. Hipotesis.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Konsep, Definisi Operasional, dan Pengukuran.....	34
B. Penentuan Lokasi dan Sampel Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Pengolahan dan Analisis Data.....	44
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran.....	48



B. Hasil dan Pembahasan.....	51
1. Keadaan Umum Desa .....	51
2. Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Pembangunan Desa .....	54
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa .....	72
4. Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun.....	85
5. Menganalisis Tantangan dan Kendala Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa .....	92
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Rincian dana desa per kabupaten/kota dalam APBN dan jumlah 2018-2020. ....	4
Tabel 2. Jumlah status Desa berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM).. di Provinsi Lampung 2019 .....	5
Tabel 3. Ringkasan penelitian terdahulu .....	20
Tabel 4. Definisi operasional pengukuran variabel penelitian.....	37
Tabel 5. Jumlah desa sampel penelitian .....	42
Tabel 6. Jumlah desa/luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran, 2018-2020 .....	49
Tabel 7. Sebaran penduduk usia produktif di Kabupaten Pesawaran menurut mata pencaharian utama .....	50
Tabel 8. Luas wilayah berdasarkan status desa.....	51
Tabel 9. Jumlah penduduk berdasarkan status desa.....	52
Tabel 10. Jumlah penduduk miskin berdasarkan status desa.....	53
Tabel 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja 2019 .....	54
Tabel 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanura 2019.....	56
Tabel 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates 2019 .....	57
Tabel 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wiyono 2019.....	58
Tabel 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagelen 2019 .....	59
Tabel 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesawaran Indah 2019 .....	60
Tabel 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Way Layap 2019.....	61
Tabel 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kresno Widodo 2019 .....	62
Tabel 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poncorejo 2019 .....	63
Tabel 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjar Negeri 2019.....	64
Tabel 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panca Bakti 2019 .....	65
Tabel 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Way Harong 2019.....	66
Tabel 23. Prinsip pengelolaan dana desa berdasarkan status desa.....	73
Tabel 24. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa berdasarkan status desa.....	75
Tabel 25. Hasil uji keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kinerja aparat desa, komoditas unggulan, ketersediaan lembaga ekonomi,	



kondisi geografis dan prinsip pengelolaan dana desa (transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran) .....	79
Tabel 26. Pengaruh masing-masing variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.....	80
Tabel 27. Perolehan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran.....	86
Tabel 28. IDM Desa Kabupaten Pesawaran .....	88
Tabel 29. Hasil uji pengaruh dana desa terhadap status desa .....	90
Tabel 30. Identitas responden di Kabupaten Pesawaran .....	103
Tabel 31. Karakteristik Desa di Kabupaten Pesawaran .....	106
Tabel 32. Hasil MSI Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran .....	107
Tabel 33. Hasil MSI Faktor-Faktor keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran .....	112
Tabel 34. Penggunaan Dana Desa Desa Sukaraja.....	116
Tabel 35. Penggunaan Dana Desa Desa Hanura.....	117
Tabel 36. Penggunaan Dana Desa Wates.....	118
Tabel 37. Penggunaan Dana Desa Desa Wiyono.....	119
Tabel 38. Penggunaan Dana Desa Desa Bagelen.....	120
Tabel 39. Penggunaan Dana Desa Desa Pesawaran Indah .....	121
Tabel 40. Penggunaan Dana Desa Desa Way Layap .....	122
Tabel 41. Penggunaan Dana Desa Desa Kresno Widodo .....	123
Tabel 42. Penggunaan Dana Desa Desa Poncorejo .....	124
Tabel 43. Penggunaan Dana Desa Desa Banjar Negeri .....	126
Tabel 44. Penggunaan Dana Desa Pancabakti .....	127
Tabel 45. Penggunaan Dana Desa Desa Way Harong .....	128
Tabel 46. Angka Indeks Desa Membangun Kabupaten Pesawaran.....	129
Tabel 47. Hasil Analisis Uji Regresi Berganda Faktor-faktor yang Mempengaruhi keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran .....	130
Tabel 48. Hasil Analisis Uji Regresi Sederhana Pengaruh Dana Desa Terhadap Status Desa di Kabupaten Pesawaran .....	131
Tabel 49. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik Multikolinear .....	132

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka berfikir dana desa dan pengaruhnya terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Pesawaran .....	33
Gambar 2. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran (ribu jiwa) tahun 2020.....	50
Gambar 3. Pemanfaatan dana desa pada berbagai bidang .....	69
Gambar 4. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik Histogram.....	133
Gambar 5. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik P-P Plot .....	133
Gambar 6. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik Scatterplot .....	134

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut UUD nomor 32 tahun 2004, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, terkait implementasi UUD nomor 32 tahun 2004 dapat dikaitkan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberi harapan baru untuk masyarakat desa serta membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Beberapa tujuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam dua bentuk peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu, 2018).

Keberadaan dana desa ini bukan merupakan “bantuan” dari Pemerintah Pusat kepada Desa, melainkan “kewajiban atau mandat” dari Undang-Undang

berupa distribusi uang negara untuk menjalankan kewenangan desa, yang meliputi 4 bidang: pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan (Buku Pintar Dana Desa, 2018). Dengan adanya dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari transfer APBN, sumber-sumber pendapatan desa dapat didukung secara optimal apabila pengelolaan dilakukan dengan baik guna mencapai keberhasilan pembangunan desa. Hal ini didukung oleh Kementerian Desa (2019), bahwa terkait dana desa misalnya, redistribusi aset negara bersumber APBN itu membuktikan mampu menggerakkan perubahan di desa. Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yakni; (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat (Letty, 2019). Keberhasilan penggunaan dana desa ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor. Salah satu yang perlu digaris bawahi adalah komitmen Kepala dan Perangkat Desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan asas pengelolaan dana desa. Ada beberapa faktor lain yang juga terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan desa di setiap daerah, yaitu potensi daerah, kinerja aparat desa, perkembangan ekonomi dan penduduk, serta manajemen pengelolaan pendapatan asli (Hakim, 2017).

Satu sisi dana desa telah memberikan kesempatan kepada desa untuk menentukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa. Disisi lain, untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih harus terus ditingkatkan dan masih adanya penyimpangan dana desa. Dana tersedia dan arahan pemanfaatan dana juga telah ada serta dilengkapi dengan mekanisme penyusunan anggaran. Akan tetapi, hal ini belum menjamin bahwa alokasinya berkinerja, karena semua itu adalah sumber daya pasif (*passive resources*). Tidak berbeda dengan



Provinsi Lampung, banyak kasus penyelewengan dana desa oleh kepala desa hingga mencapai ratusan juta. Meskipun demikian, adanya penyelewengan pengelolaan dana desa juga tidak menutup kemungkinan keberhasilan desa dalam mengelola dana desa, misalnya melalui dana desa beberapa prestasi pada tahun 2018 yang diraih Provinsi Lampung antara lain; penghargaan Desa Terbaik Kategori Sistem Padat Karya Tunai (PKT) Pengelolaan Dana Desa 2018. Penghargaan ini diraih oleh Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Begitu juga pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran mendapatkan penghargaan Desa Terbaik Nasional berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018. Desa-desa tersebut mengindikasikan bahwa dalam pemanfaatan dana desa telah baik mendukung keberhasilan pembangunan desa. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa pada penggunaan sebelumnya, jika penyaluran kinerja penggunaan dana desa tidak berjalan dengan baik maka penyaluran tahap berikutnya akan ditunda. Adapun penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyaluran periode pertama dilakukan pada bulan April dengan jumlah 40 persen
- 2) Penyaluran periode kedua dilakukan pada bulan Agustus dengan jumlah 40 persen
- 3) Penyaluran periode ketiga dilakukan pada bulan Oktober dengan jumlah 20 persen

Dana Desa juga dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: 1) jumlah penduduk, 2) angka kemiskinan, 3) luas wilayah,

dan 4) tingkat kesulitan geografis. Berikut rincian penerimaan alokasi dana desa per Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2018 - 2020.

Tabel 1. Rincian dana desa per kabupaten/kota dalam APBN dan jumlah 2018-2020.

No	Nama Daerah	Dana Desa (Juta Rupiah)			Jumlah Desa
		2018	2019	2020	
1	Lampung Barat	112,064	127,188	127,438	136
2	Lampung Utara	212,964	248,160	248,160	247
3	<b>Lampung Timur</b>	<b>236,184</b>	<b>273,707</b>	<b>281,370</b>	<b>264</b>
4	<b>Tanggamus</b>	<b>245,179</b>	<b>293,682</b>	<b>293,682</b>	<b>302</b>
5	Way Kanan	164,544	183,883	187,680	227
6	<b>Lampung Tengah</b>	<b>261,266</b>	<b>309,009</b>	<b>313,430</b>	<b>314</b>
7	Lampung Selatan	230,459	261,327	263,692	260
8	Tulang Bawang	126,583	132,914	134,680	153
9	Pesawaran	135,482	155,640	157,340	148
10	Pringsewu	105,705	129,567	129,667	131
11	Mesuji	87,134	101,767	103,820	105
12	Tulang Bawang Barat	74,834	89,161	91,900	103
13	Pesisir Barat	98,993	121,008	121,010	118
<b>Jumlah</b>		2.091,398	2.427,021	2.453,875	2.508

Sumber: Kementerian Keuangan 2020

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari beberapa kabupaten yang ada di Lampung, Kabupaten yang memperoleh dana desa tertinggi antara lain; Kabupaten Lampung tengah, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Timur, jika dilihat hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 terkait jumlah dana yang diperoleh per/kabupaten sesuai dengan jumlah desa yang ada, akan tetapi jumlah yang diterima ini belum dapat menggambarkan bahwa wilayah dengan perolehan dana terbanyak merupakan wilayah yang baik dalam pengelolaan dana desa yang diterimanya. Jika dibandingkan dengan data berdasarkan angka Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah status Desa berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Lampung 2019

No	Nama Daerah	Status Desa					Rata-rata IDM
		a	b	c	d	e	
1	Lampung Barat	2	30	85	14		0,5510
2	<b>Lampung Selatan</b>		<b>37</b>	<b>206</b>	<b>13</b>		<b>0,6179</b>
3	<b>Lampung Tengah</b>		<b>54</b>	<b>221</b>	<b>26</b>		<b>0,6086</b>
4	Lampung Timur		19	182	63		0,6069
5	Lampung Utara		7	121	104		0,5598
6	Mesuji		14	62	26	3	0,5658
7	Pesawaran	3	12	118	11		0,5833
8	Pesisir Barat		4	53	56	3	0,5712
9	<b>Pringsewu</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>11</b>		<b>0,6078</b>
10	Tanggamus		19	223	53	4	0,5618
11	Tulang Bawang		5	102	37	3	0,5674
12	Tulang Bawang Barat		8	73	12		0,5792
13	Way Kanan		3	134	78	6	0,5874
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>232</b>	<b>1.674</b>	<b>504</b>	<b>19</b>	

Sumber: Kementerian Desa 2019

Ket: a. Mandiri; b. Maju; c. Berkembang; d. Tertinggal; e. Sangat Tertinggal

Dari Tabel 2 terlihat, bahwa tiga kabupaten dengan nilai rata-rata IDM tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Pringsewu yang masuk ke dalam klasifikasi Desa Berkembang. Angka IDM ini sendiri didasarkan pada kemampuan desa mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan sehingga membawa desa menjadi mandiri, pengelolaan atas sumberdaya yang ada tersebut tentunya tidak lepas dari keberadaan dana yang ada di desa, baik dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa maupun diluar pendapatan tersebut. Untuk itu dapat dilihat kembali bahwa kabupaten yang memiliki desa pada status mandiri, yaitu Kabupaten Pringsewu sebanyak satu desa, Kabupaten Lampung Barat sebanyak dua desa, dan Kabupaten Pesawaran sebanyak tiga desa. Jumlah desa dengan status mandiri ini mengalami kenaikan dari 5,85 persen pada tahun 2015 menjadi 6,30 persen pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa (Buku Pintar Dana Desa, 2018). Meskipun keberadaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa seperti yang telah disebutkan, setiap desa juga memperoleh

dana desa dan dalam pengalokasinya mengikuti aturan serta perlakuan yang sama, namun kenyataannya tidak semua desa mengalami peningkatan status desa. Artinya meningkat atau tidaknya kemampuan desa dipengaruhi oleh aturan dan jumlah dana yang diterima, selain itu juga karena adanya faktor-faktor lain yang membedakan antara satu desa dengan desa yang lain. Faktor-faktor tersebut bisa saja seperti sumberdaya pengelola, keadaan geografi, keberadaan lembaga ekonomi dan komoditas unggulan desa. Oleh karena itu, berdasarkan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015 - 2019 implementasi pengelolaan dana desa perlu diperhatikan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa, dalam hal ini salah diantaranya meningkatnya ketahanan ekonomi desa, sosial dan ekologi. Selain itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan dana desa agar dalam pelaksanaannya dapat mengoptimalkan dan memperkuat faktor tersebut. Di luar itu, analisis mengenai tantangan dan kendala dalam pengelolaan dana desa perlu dilakukan karena akan mempengaruhi pengelolaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan. Pengelolaan dana desa dapat diprioritaskan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat atau lebih difokuskan ke arah pembangunan desa yaitu pada bidang yang mayoritas masyarakat desa membutuhkan bentuk pembangunan tersebut, seperti: (a) meningkatkan pendapatan berdasarkan amanat undang-undang; (b) mewujudkan program unggulan desa berdasarkan hasil MUSRENBANG; (c) meningkatkan kapasitas desa melalui program dan kemitraan dan (d) memaksimalkan peran stakeholder dalam melakukan advokasi kebijakan dan anggaran (Akhdiyanti, 2015).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta bagaimana pengaruhnya



terhadap kemandirian desa berdasarkan indeks desa membangun. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa ?
3. Apakah ada pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun ?
4. Apa saja tantangan dan kendala pengelolaan dana desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa
3. Menganalisis pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun
4. Menganalisis tantangan dan kendala pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai refleksi bahwa dana desa mampu mengubah desa dan masyarakat menjadi lebih mandiri.
2. Sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan pedesaan bagi Pemerintah
3. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti untuk penelitian yang sejenis

## II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Desa

Desa adalah kasatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa yang merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Menurut Haryanto (2007), desa memiliki wewenang yaitu (a) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak usul. (b) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten / kota yang diserahkan pengaturan kepada desa yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota (d) urusan pemerintahan lainnya yang diseralikan kepada desa.

Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemeintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa:

” Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat*

*istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan republik indonesia”*

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, penjelasan mengenai desa, *“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dan sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”*.

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri, sedangkan definisi desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya Pemerintahan Desa/Marga, adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 dan Dana Desa).

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 60 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat

Indikator keberhasilan alokasi dana desa menurut surat edaran mendagri 140/640/SJ pada tanggal 22 maret 2005 tentang pedoman alokasi dana desa dapat diukur dari beberapa point di bawah ini:

- a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya alokasi dana desa.
- b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa.
- c) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/ miskin



### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat. Peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sementara itu, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan digunakan untuk memperkuat posisi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah. Pembiayaan keuangan Daerah salah satunya didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sebagian kecil dari total APBD. Di mana APBD sebagaimana diketahui memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD bersumber dari kapasitas penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, semakin besar kapasitas (potensi) dapat menyebabkan penerimaan PAD semakin tinggi, karena banyak objek/pos-pos PAD yang dapat diciptakan guna ditarik penerimaannya oleh Pemerintah Daerah.

#### 4. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) menurut KEMENDESA merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. klasifikasi itu untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa. Selain itu bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan

yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa. Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27 – 0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal:  $< 0,491$ ; (2) Desa Tertinggal:  $> 0,491$  dan  $< 0,599$ ; (3) Desa Berkembang:  $> 0,599$  dan  $< 0,707$ ; (4) Desa Maju:  $> 0,707$  dan  $< 0,815$ ; (5) Desa Mandiri:  $> 0,815$ . Dengan nilai skor masing-masing desa dan klasifikasi status desa, maka dari perhitungan itu diharapkan adanya perbedaan dalam intervensi pendekatan kebijakan. Termasuk status desa akan menentukan jumlah dana yang berbeda sesuai status klasifikasi masing-masing desa.

Dalam dokumen IDM itu juga dicontohkan, untuk Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dua status itu melekat, karena minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya. Dalam melihat skor dan ambang batas IDM itu, setidaknya terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal. Adapun faktor kerentanan itu adalah terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, konflik sosial berkepanjangan.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan. Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa.

IDM disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa tahun sebelumnya. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik  $\leq 3$  Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik  $> 10$  Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan  $< 30$  menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktivitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks:

$$\text{Indeks Variabel} = (\sum \text{Indikator} X) / (\text{Nilai Maksimum } (X))$$

Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$$

Keterangan:

IS: Indeks Sosial

IE: Indeks Ekonomi

IL: Indeks Lingkungan

Kemudian dalam menetapkan status setiap desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status desa.

## 5. Pembangunan Desa

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005) menjelaskan pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya, menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik. Menurut Muhi (2011), terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:

- a) Pembangunan perdesaaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objeknya sesuai dengan aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya.
- b) Pembangunan perdesaaan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan yang menyangkut aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, *skill* dan pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan sebagai warga negara yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan dan ditindak lanjuti dengan aktivitas pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik.

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati mayarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*).

Pembangunan desa menurut Yudha (2018) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa dituntut untuk bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dimana pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan. Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam UU 6/2014 Pasal 82 ayat (4) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Penjelasan yang lebih spesifik dari Prioritas, Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Pembangunan Desa tercantum dalam Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## **6. Faktor-Faktor Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa harus menyatu di dalam pengelolaan APBDES, sehingga prinsip pengelolaan dana desa sama persis dengan pengelolaan APBDES, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain : 1. Partisipatif, proses pengelolaan dana desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola dana desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya. 2. Transparan, semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini. 3. Akuntabel, keseluruhan proses penggunaan dana desa, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa. 4. Kesetaraan, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa mempunyai hak dan kedudukan yang sama (Jurniadi, Djumadi, dan DB.Paranoan, 2015)

Menurut Yudha (2018), Potensi desa merupakan segala sesuatu yang ada di desa yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mensistemisasikan desain pola kerjasama antar desa yang efektif dalam rangka peningkatan PAD, maka ada beberapa faktor yang perlu dijadikan pertimbangan, yakni faktor karakteristik



potensi desa, faktor internal kelembagaan desa, dan faktor eksternal yang mempengaruhi.

a) Faktor Karakteristik Potensi Desa

Faktor karakteristik potensi desa ini terdiri dari dua bagian, yakni faktor fisik dan faktor non fisik. Faktor fisik dapat berupa kondisi geografis desa, kondisi infrastruktur yang ada di desa, dan faktor komoditas unggulan atau potensi-potensi lainnya yang didukung secara alamiah. Pada sisi lainnya, faktor non fisik adalah kondisi tingkat atau kualitas sumberdaya manusia yang ada di desa berupa pengalaman dan keterampilan SDM desa, tingkat pendidikan SDM Desa, dan potensi-potensi kelembagaan ketersediaan lembaga ekonomi desa yang mampu mendukung perkembangan perekonomian desa.

b) Faktor Internal Kelembagaan Desa

Faktor internal kelembagaan desa menunjukkan bagaimana tujuan utama yang tercantum dalam kelembagaan desa. Dimana tujuan pembangunan pada masing-masing desa yang diterjemahkan pada misi dan dilaksanakan melalui program kegiatan ini memiliki suatu kesamaan dengan desa-desa lainnya, sehingga bisa disusun suatu metode dan format kerjasama antara desa yang efektif, efisien, dan bersifat simbiosis mutualisme.

c) Faktor Eksternal Desa

Faktor eksternal desa adalah faktor di luar desa yang mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Faktor eksternal ini dapat berupa tingkat pembinaan pendamping terhadap desa, peluang potensi pasar, peluang investasi, kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan faktor-faktor dari luar lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat pembangunan perdesaan.

## **7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan referensi bagi peneliti untuk menjadi pembanding antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, serta untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data. Beberapa penelitian dijadikan rujukan karena memiliki persamaan dalam alat analisis dan perbedaannya terletak pada tujuan maupun lokasi penelitian antara lain dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan penelitian terdahulu

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
1.	Nurul Syaspri Akhdiyanti (2015)	Strategi Penguatan Partisipasi dan Kapasitas Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekongkang Atas	(1) Mengkaji kebijakan ADD di Kabupaten Sumbawa Barat, (2) Mengetahui implementasi pengelolaan ADD dan (3) Merancang strategi pengelolaan ADD.	Metode kajian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan diperkuat pula dengan analisis data kuantitatif.  Perancangan strategi menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats)	-Pemerintah Sumbawa Barat mengatur kebijakan ADD sejak tahun 2006 - 2013 dalam tiga bentuk produk hukum, yaitu (1) Surat Keputusan (2) Peraturan Bupati dan (3) Peraturan Daerah -Implementasi ADD di Kabupaten Sumbawa Barat mengacu pada Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dan Surat Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan setiap tahun anggaran. -Perancangan strategi meliputi: (a) meningkatkan ADD berdasarkan UU; (b) mewujudkan program unggulan desa berdasarkan hasil; (c) meningkatkan kapasitas desa; dan (d) memaksimalkan peran stakeholder.
2.	Eka Purna Yudha (2018)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang –	(1) Menganalisa tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa; (2) Menganalisa pengaruh implementasi penggunaan dana	Alat analisis dari penelitian menggunakan model persamaan simultan logaritma natural (ln) regresi berganda dengan dummy slope.	- Tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai yang bervariasi pada sangat rendah namun dinyatakan cukup wajar, karena desa masih dalam proses adaptasi terhadap kebijakan otonomi pengelolaan keuangan desa -Hasil dari pengelolaan keuangan desa berupa belanja desa berpengaruh cukup signifikan

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
		Banten)	desa terhadap kinerja pembangunan desa; dan (3) Menyusun strategi pengembangan desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa.		terhadap kinerja pembangunan desa yang diwakili oleh nilai indeks desa membangun - Strategi untuk bisa mempercepat proses pembangunan desa dengan melakukan modifikasi Indeks Desa Membangun Modifikasi
3.	Elvina dan Musdhalifah (2019)	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis jalur yaitu melihat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen baik secara langsung maupun tidak langsung  Model analisis data dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur yang paling besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan adalah partisipasi masyarakat. Hal ini berarti partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4	Abdul Mutolib, Dewangga Nikmatullah, Irwan Effendi, Begem	Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa	Penelitian bertujuan untuk menganalisis kontribusi Dana Desa dalam pengembangan	Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dana desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Hanura mengalokasikan biaya untuk Kegiatan Pengadaan Sarana

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
	Viantimala, dan Ali Rahmat (2019)	Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung	BUMDes di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten pringsewu , Provinsi Lampung		Prasarana Produksi Usaha Pertanian/peternakan/perikanan sebesar Rp. 12.265.000,00. Kemudian Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pemasaran (Pembangunan pertokoan dan Koperasi) sebesar Rp. 104.700.000,00, dan Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya serta Belanja Modal Hewan dan Ternak) sebesar Rp. 39.999.997,00. Unit usaha yang dimiliki BUMDes Hati Nurani meliputi: 1) Pengelolaan Pasar, 2) Unit Produk dan Jasa, 3) Industri Rumah Tangga. Salah satu strategi pemasaran BUMDes adalah melalui penjualan secara online melalui website BUMDes.
5	Nyimas Latifah Letty Aziz (2016)	Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa	Penelitian bertujuan untuk mengkaji implementasi UU No.6/2014 tentang Dana Desa da melihat efektivitasnya	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.	Lahirnya UU No.6/2014 menghidupkan kembali peran penting pemerintahan desa sebagai otonomi asli. Pemerintah desa dapat turut serta dalam proses pembangunan dengan turut bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui pemanfaatan penggunaan dana desa
6	Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi,dan	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Menggambarkan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
	Suwondo (2015)	(Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	pemberdayaan masyarakat desa; faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wonojero Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.	menggunakan metode analisis Milles dan Huberman	ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat
7	Dina Banurea dan Mahmuddin (2018)	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat)	Mengetahui peran pemerintah desa dalam prioritas pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2016 diprioritaskan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa lebih difokuskan kearah pembangunan desa yaitu bidang pembangunan infrastruktur prasarana kawasan pertanian, dikarenakan masyarakat desa mayoritas memiliki mata pencaharian petani sehingga pembangunan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat desa di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kabupaten Pakpak Bharat.
8	Cherrya Damara, Dewangga Nikmatullah,	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program	Mengetahui efektifitas strategi pemberdayaan masyarakat (PPMK)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah reduksi	Strategi pemberdayaan masyarakat (PPMK) melalui pelatihan komputer dan dana bergulir efektif, karena pelaksanaan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman umum

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
	dan Indah Nurmayasari (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kota Bandar Lampung	di Kota Bandar Lampung melalui pelatihan komputer dan dana bergulir, dan mengetahui manfaat yang diperoleh peserta setelah mengikuti pelatihan komputer dan dana bergulir melalui PPMK di Kota Bandar Lampung	data, penyajian data, dan menarik kesimpulan	PPMK seperti 80,00 persen peserta dana bergulir telah memanfaatkan dana tersebut untuk usaha ekonomi produktif dan membuka lapangan kerja baru, dan 71,43 persen. Manfaat yang diperoleh peserta setelah adanya dana bergulir adalah peserta dapat menggunakan dana yang diterima untuk menambah modal usaha, mengembangkan dan memajukan usaha, serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
9	Aminah dan Novita Sari (2018)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Raya)	Mengetahui pengelolaan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan	Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari lima bidang hanya dua diantaranya yang berjalan. Pemberdayaan dapat berjalan lancar jika mengandung prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, kemandirian, dan keberlanjutan
10	Mukhtar Hakim (2017)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas	(1) Menganalisis efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan	Data dianalisis dengan analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, elastisitas, rasio kemandirian daerah, analisis Strengths,	(1) Efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011 - 2015 berfluktuasi dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung membaik, (2) Elastisitas PAD terhadap PDRB bernilai positif



Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
			Anambas; (2) menganalisis kepekaan PAD terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) menganalisis rasio kemandirian daerah; dan (4) menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas.	Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)	pada komponen pajak, retribusi dan bagian laba usaha daerah, (3) Rasio kemandirian daerah masih sangat rendah (Instruktif), (4) Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah; peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah; peningkatan kualitas SDM pengelola PAD; peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan minimal; membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait dalam penerimaan PAD; peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD; perbaikan sistem informasi dan data dalam pengelolaan PAD; dan mengurangi perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD.
11	Boedijono, dkk (2019)	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso	(1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektifitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso	Metode penelitian ini merupakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif	Secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya.

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
12	Wikan Budi Utami, dan Ketut Wahyu Ibrahim (2019)	Pengaruh Pembangunan Desa dan Faktor Faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa	Untuk mengetahui pengaruh pembangunan desa dan faktor akuntabilitas yang dapat menghambat alokasi pengelolaan dana desa pada alokasi publik pengelolaan desa	Menggunakan metode analisis kuantitatif dengan olah data regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan desa dan faktor-faktor yang dapat menghambat pengalokasian pengelolaan pengelolaan desa berpengaruh terhadap alokasi pertanggungjawaban publik.
13	Aji Fani Permana (2018)	Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan Desa	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.	Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan melalui beberapa hal, seperti meningkatkan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan daya tarik investasi desa.
14	Bismar Arianto, Nur A. Dwi Putri, dan Askarmin (2019)	Pemanfaatan Dana Desa Dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten	Untuk mengetahui bagaiman hasil dari pemanfaatan dana desa terhadap penambahan dan pemanfaatan sarana fisik dasar, pemberdayaan	Penelitian Pemanfaatan Dana ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.	Secara signifikan kontribusi yang dirasakan masyarakat dari dana desa yang signifikan pada penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembanguna PAUD, Posyandu dan lain-lain. Kontribusi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
15	Rahayu Septa Nugraheni, Candra Fajri Ananda, dan Wildan Syafitri (2018)	Bintan Provinsi Kepulauan Riau) Analisis Dampak Alokasi Anggaran Desa Dan Infrastruktur Desa Pada Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Semarang	masyarakat di Kabupaten Bintan (1) Menganalisis pengaruh Infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan, (2) Menganalisis pengaruh anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap tingkat kemiskinan, (3) Menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Logistik	pendirian dan penyertaan modal di BUMDes.  Beberapa faktor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan desa yaitu akses kesehatan. Pertambahan jumlah penduduk secara negatif mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penggunaan dana desa masih di digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Sedangkan alokasi anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat terbukti berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa. Kegiatan kegiatan yang dibiayai alokasi anggaran ini seperti bedah rumah, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, pembiayaan BPJS bagi warga miskin telah dialokasikan oleh desa di Kabupaten Semarang.
16	Ainil Fhadilah (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi alokasi dana desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi	Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif kuantitatif dan dianalisis dengan Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Sumber Daya Manusia, Komitmen, Motivasi, Pelatihan, dan Sistem Audit Internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Jambi. Secara parsial variabel Sumber Daya Manusia, Komitmen, Pelatihan, Sistem Audit Internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel Motivasi tidak berpengaruh terhadap Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa.

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
17	Jurniadi, Djumadi, dan DB.Paranoan (2015)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur	Untuk mengetahui secara parsial maupun simultan pengaruh variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, berkelanjutan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur	Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanatif dan alat analisis regresi linier berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel-partisipatif (X1), transparansi (X2), akuntabel (X3), dan berkelanjutan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Secara parsial variabel partisipatif (X1), transparansi (X2), akuntabel (X3), dan berkelanjutan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
18	Sayekti Suindyah Dwiningwarni dan Ahmad Zuhdi Amrulloh (2020)	Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur	(1) Menganalisis pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes; (2) Menganalisis pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; (3) Menganalisis pengaruh program pemberdayaan terhadap pendapatan	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan Logaritma Natural	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat, pembangunan fisik tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 3 Ringkasan penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis, Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
19	Inten Meutia, dan Liliana (2017)	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan	Analisis akan dilakukan dengan proses deskripsi kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian mengungkap aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan
20	Endra Wijaya, dan Mochamad Firmansyah Roni (2019)	Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya	(1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa	Dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar.

## B. Kerangka Pemikiran

Desa menghadapi banyak masalah, seperti kemiskinan, kesehatan masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, angka pengangguran yang cukup tinggi, rendahnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa, kerusakan lingkungan alam, kerusakan infrastruktur dan permasalahan lainnya. Dengan adanya tambahan pendapatan desa berupa dana desa maka persoalan-persoalan tersebut akan lebih mudah ditangani dan dicarikan solusinya sesuai dengan prioritas dan kewenangan desa, mengingat perencanaan, alokasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilaksanakan oleh desa itu sendiri (Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014). Hal ini didukung oleh Kementerian Desa (2019), bahwa terkait dana desa misalnya, redistribusi aset negara bersumber APBN itu membuktikan mampu menggerakkan perubahan di desa. Selama ini pendapatan desa bersumber dari dana transfer, hibah, dan pendapatan asli desa yang terdiri dari: hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Adanya pendapatan yang bersumber dari alokasi dana APBN tentu saja merupakan kebijakan baru yang positif dan penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna mencapai kemandirian desa. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, kategori tingkat kemandirian desa berdasarkan angka Indeks Desa Membangun (IDM), meliputi; 1) desa mandiri; 2) desa maju; 3) desa berkembang; 4) desa tertinggal; dan 5) desa sangat tertinggal.

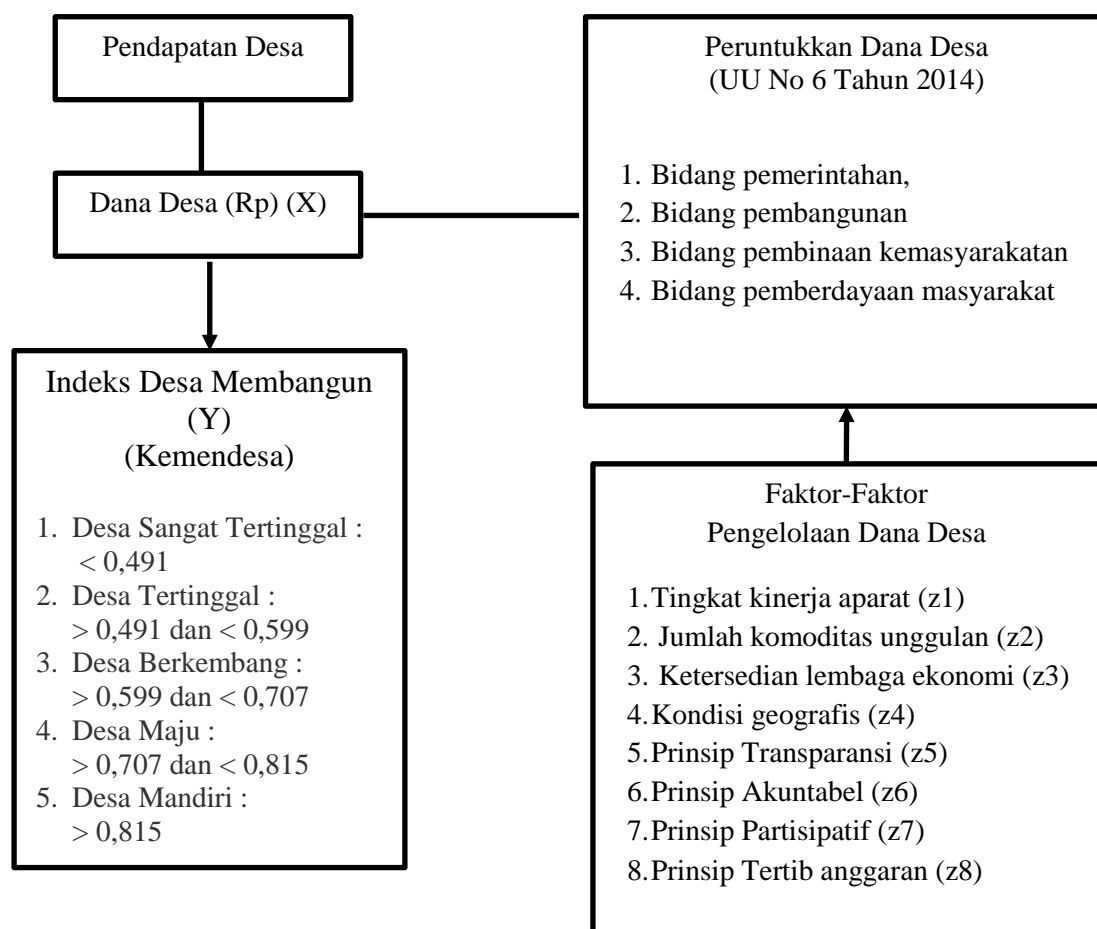
Dana desa yang diturunkan ditingkat daerah secara otomatis menambah pendapatan desa, namun penggunaan dana desa terkait kegiatan pembangunan desa perlu dilihat berdasarkan bidang pengelolaannya yang kemudian dapat diukur melalui angka IDM. Apakah implementasi Peraturan

Pemerintah no 6 Tahun 2014 mengenai dana desa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kemandirian desa serta bagaimana desa mengelola dana desa pada berbagai macam bidang kegiatan. Penelitian ini ingin melihat seberapa besar kontribusi penerimaan khususnya yang berasal dari dana desa terhadap indeks membangun desa, serta bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah no 6 Tahun 2014 tentang penggunaan dana desa pada kegiatan prioritas, yaitu 1) bidang pemerintahan, 2) bidang pembangunan, 3) bidang pembinaan kemasyarakatan dan 4) bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, akan dapat diketahui penggunaan dana desa akan lebih banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik atau pemberdayaan masyarakat ataupun keduanya setara. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip; 1) transparan yang digambarkan dengan adanya informasi, keterbukaan dan pengungkapan pemanfaatan dana desa kepada publik; 2) akuntabel yang digambarkan dengan adanya manfaat, kesesuaian dan aturan yang berlaku; 3) partisipatif yang digambarkan dengan keikutsertaan masyarakat pada tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan; 4) tertib dan disiplin anggaran yang digambarkan dengan adanya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan hasil aturan desa dan APBD. Melalui prinsip-prinsip tersebut dapat diukur bagaimana keberdayaan masyarakat atau publik untuk dapat mengetahui, melaksanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan hasil pengelolaan keuangan desa baik dari sumber dana desa dan pendapatan lainnya. Dana desa merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa dan kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan pada bidang sosial, ekonomi dan ekologi.

Indikator kemandirian desa dapat dinilai dari bagaimana desa mengelola ketiga bidang tersebut secara berkelanjutan, sehingga peningkatan kemandirian desa menjadi fokus perhatian agenda dari setiap kegiatan daerah. Ada beberapa faktor yang terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan desa di setiap daerah, yaitu potensi daerah, tingkat kinerja aparat desa, perkembangan ekonomi dan penduduk, serta manajemen pengelolaan pendapatan asli (Hakim, 2017), sedangkan menurut Yudha (2018), potensi desa merupakan segala sesuatu yang ada di desa yang dapat dioptimalkan



untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mensistemisasikan desain pola kerjasama antar desa yang efektif dalam rangka peningkatan pendapatan, maka ada beberapa faktor yang perlu dijadikan pertimbangan, yakni faktor karakteristik potensi desa, faktor internal kelembagaan desa, dan faktor eksternal. Pendapatan desa akan meningkat secara optimal apabila sumber-sumber pendapatan juga meningkat secara optimal. Adanya dana desa dan pengaruhnya terhadap peningkatan indeks desa dapat difokuskan pada beberapa hal, yaitu bagaimana penyelenggaraan keuangan desa pada berbagai bidang, besaran penerimaan dana desa, serta pengaruh dana desa terhadap tingkat kemandirian desa . Perlu diperhatikan juga faktor-faktor lain, hal ini karena besarnya pengaruh dana desa terhadap peningkatan kemampuan setiap desa tidaklah sama. Faktor-faktor tersebut bisa saja seperti sumberdaya pengelola keuangan desa, keadaan ekologi, budaya, ekonomi dan lain sebagainya yang membedakan antara satu desa dengan desa yang lain. Sehingga, akan diketahui bagaimana pengaruh adanya dana transfer berupa dana desa terhadap tingkat kemandirian desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Terkait pengelolaan dana desa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi diantaranya; 1) tingkat kinerja aparat; 2) jumlah komoditas unggulan; 3) ketersediaan lembaga ekonomi dan 4) kondisi geografis. Terkait uraian diatas, masing-masing variabel akan mewakili bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa, serta besarnya dana desa dapat di analisis dengan besaran pendapatan desa yang diperoleh pada berbagai tingkat/status desa. Berdasarkan uraian di atas, kerangka berfikir yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka berfikir dana desa dan pengaruhnya terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Pesawaran

### C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang ada, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh tingkat kinerja aparat desa, jumlah komoditas unggulan, ketersediaan lembaga ekonomi, kondisi geografis, Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabel, Prinsip Partisipatif dan Prinsip Tertib anggaran
2. Dana desa berpengaruh terhadap peningkatan status desa yang digambarkan dengan indeks desa membangun di Kabupaten Pesawaran.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Konsep, Definisi Operasional, dan Pengukuran**

Konsep adalah kesatuan arti yang digunakan untuk membuat klasifikasi atau penggolongan yang dinyatakan dalam suatu istilah atau rangkaian kata. Definisi Operasional adalah seluruh definisi atau petunjuk yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai dan telah disesuaikan dengan keadaan dilapangan. Konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Ukuran variabel yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).
2. Hasil usaha desa adalah sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, badan kredit desa, dan koperasi desa.
3. Hasil pengelolaan aset desa adalah sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, objek rekreasi yang diurus oleh desa, hutan desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang di urus oleh desa, tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, jalan desa; lain-lain kekayaan milik desa.
4. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Misalnya iuran perkepala keluarga, iuran tempat penitipan

sepeda/motor, hasil swadaya dan partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Lain-lain pendapatan asli desa adalah hasil pungutan desa berupa ganti ongkos cetak surat-surat/blangko-blanko, biaya legalisasi surat-surat, biaya legalisasi, sewa tanah lapangan, dan lain-lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
7. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
9. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
10. Tingkat kinerja aparat desa didasarkan atas kemampuan penetapan aturan desa, pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban, pengaturan penduduk, penataan wilayah pengelolaan desa, kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan/pemberdayaan masyarakat, pengelolaan administrasi, kemampuan aparat memotivasi, menjaga hubungan kerja sama, memberikan saran, dan bekerja sesuai dengan topoksi.
11. Kondisi geografis ini diantaranya dilihat dari bagaimana akses jalan menuju lokasi desa, riwayat bencana alam, dan ketersediaan air bersih.
12. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) undang-undang no 6 tahun 2014 antara lain: penetapan dan penegasan batas desa; pendataan desa; penyusunan tata ruang desa; penyelenggaraan musyawarah desa; pengelolaan informasi desa; penyelenggaraan perencanaan desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; penyelenggaraan kerjasama antar desa;

pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

13. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain: pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.
14. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
15. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat

Definisi operasional dan pengukuran menunjukkan secara lebih rinci terkait dengan apa yang akan diukur dan bagaimana cara mengukur variabel dalam penelitian ini. Definisi operasional dan pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Definisi operasional pengukuran variabel penelitian.

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
1	Transparan	keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa	1. Informatif	Adanya pemberian informasi, berita, kejelasan, mekanisme, data, fakta pemanfaatan dana desa kepada publik berupa	Skor 3: mudah didapat Skor 2: kurang mudah didapat Skor 1: tidak mudah didapat	Tinggi Sedang Rendah
			2. Keterbukaan	Keterbukaan informasi bagi publik untuk mengakses data terkait pemanfaatan dana desa	Skor 3: terbuka Skor 2: kurang terbuka Skor 1: tidak terbuka	
			3. Pengungkapan	Pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan dalam bentuk laporan	Skor 3: tersedia Skor 2: kurang tersedia Skor 1: tidak tersedia	
2	Akuntabel	Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian	1. Adanya manfaat yang terukur	penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan desa	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	Tinggi Sedang Rendah

Tabel 4 Definisi operasional pengukuran variabel penelitian (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
		sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan	2. Adanya sanksi yang diterapkan atas kelalaian tugas pengelola	adanya mekanisme <i>reward and punishment</i> bagi pengelola keuangan desa	Skor 3: ada <i>reward and punishment</i> Skor 2: hanya ada <i>reward/punishment</i> saja Skor 1: tidak ada <i>reward and punishment</i>	
			3. Adanya kesesuaian manfaat yang dirasakan publik	dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	
3	Partisipatif	penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa	1. partisipasi dalam perencanaan pemanfaatan dana desa 2. partisipasi dalam pelaksanaan 3. partisipasi dalam pengambilan manfaat 4. partisipasi dalam evaluasi		Skor 3: berpartisipasi Skor 2: kurang berpartisipasi Skor 1: tidak berpartisipasi	Tinggi Sedang Rendah

Tabel 4 Definisi operasional pengukuran variabel penelitian (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
4	Tertib dan disiplin anggaran	pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.	1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan aturan diatas 2. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan APBDes		Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	Tinggi Sedang Rendah
5	Hasil usaha desa	Sumber pendapatan dari usaha-usaha yang dimiliki oleh desa seperti BUMDES, dan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan Desa	1. Laba dan asset yang meningkat 2. Konsumen yang meningkat 3. Kepuasan pengelola usaha desa 4. Kepuasan masyarakat	Rupiah (Rp) Banyaknya konsumen Kepuasan pengelola usaha terhadap manajemen dan pelaksanaan usaha Membuka lapangan pekerjaan	Skor 3: tercapai Skor 2: kurang tercapai Skor 1: tidak tercapai Skor 3: bertambah Skor 2: tetap Skor 1: berkurang Skor 3: puas Skor 2: kurang puas Skor 1: tidak puas Skor 3: tercapai Skor 2: kurang tercapai Skor 1: tidak tercapai	Tinggi Sedang Rendah
6	Hasil pengelolaan aset desa	Sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari	1. Keabsahan asset desa	Asset desa yang merupakan milik desa dan dibuktikan dengan	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	Tinggi Sedang Rendah



Tabel 4 Definisi operasional pengukuran variabel penelitian (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
		potensi desa seperti hasil tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, hutan desa, tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lain (hibah, barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBdesa)	2. Dikelola desa	dokumen kepemilikan atas nama desa Asset desa dikelola pemerintah desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	
			3. Dikelola berdasarkan asas pengelolaan aset	Fungsional, kepastian hukum, efektif dan efisien, akuntabilitas	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	
			4. Berdayaguna, dan hasilguna	Meningkatkan pendapatan desa	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	
			5. Mendapatkan persetujuan BPD		Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	
7	Swadaya, partisipasi, dan gotong royong	Sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.	1. Hasil Iuran perkepala keluarga	Rencana, tujuan, dan hasil yang dicapai	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai Skor 1: tidak sesuai	Tinggi Sedang Rendah
			2. Hasil swadaya dan partisipasi lain yang	Rencana, tujuan, dan hasil yang dicapai	Skor 3: sesuai Skor 2: kurang sesuai	

Tabel 4 Definisi operasional pengukuran variabel penelitian (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
			ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.		Skor 1: tidak sesuai	
8	Lain-lain pendapatan asli desa	Sumber pendapatan yang diperoleh dari pungutan desa	Hasil biaya ganti ongkos cetak surat/blangko, biaya legalisasi surat-surat, biaya legalisasi Wesel, sewa tanah lapangan	Pendapatan per tahun	Rupiah (Rp)	Tinggi Sedang Rendah
			Hasil biaya lain-lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Pendapatan per tahun	Rupiah (Rp)	
9	Pendapatan asli desa	Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang didapat dari hasil-hasil usaha (ekonomi dan non-ekonomi) desa.	Sumber pendapatan asli desa, yaitu hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.		Rupiah (Rp)	Tinggi Sedang Rendah

## B. Penentuan Lokasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki desa dengan status mandiri terbanyak dan beberapa desa dengan status lainnya. Kabupaten Pesawaran juga merupakan kabupaten yang mewakili keberhasilan desa terbaik dan kabupaten dengan angka Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2018. Tabel 5 dapat dilihat jumlah desa yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah desa sampel penelitian

Status Desa	Jumlah Desa	Jumlah Sampel
Mandiri	3	3
Maju	12	3
Berkembang	118	3
Tertinggal	11	3
Sangat tertinggal	0	0
<b>Total</b>	144	12

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2019

Pada Tabel 5 dapat dilihat jumlah desa sebanyak 12 desa dari Kabupaten Pesawaran. Desa pada status desa mandiri diambil seluruhnya, kemudian desa dengan status desa maju, berkembang, dan tertinggal diambil secara sengaja dengan pertimbangan setiap desa yang terpilih dapat mewakili desa-desa lain dengan status desa yang sama (*homogen*). Penentuan desa menggunakan teknik *stratified random sampling* sehingga setiap unit desa pada setiap status desa mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi tempat lokasi penelitian.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti menurut teori Arikunto (2013). Jika sampel dipilih dengan tepat maka dapat memprediksi populasi, sehingga sampel merupakan representatif dari populasi. Oleh karena itu, untuk membuat suatu generalisasi yang tepat, di samping penentuan jumlah sampel juga yang lebih penting adalah *representative* (keterwakilan). Keterwakilan sampel atas populasi ditentukan dari penggunaan metode dan

teknik penarikan sampel yang tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di Kabupaten Pesawaran. Dari 12 desa sebagai lokasi penelitian, seluruh aparat desa akan dijadikan sebagai sampel/responden dengan pertimbangan bahwa aparat desa memiliki andil dan mengetahui terkait kegiatan pengelolaan dana desa, dan PAD. Aparat desa yang dimaksud, diantaranya:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Umum
4. TU
5. Kaur Keuangan
6. Kaur Perencanaan
7. Kasi Pemerintahan
8. Kasi Kesejahteraan
9. Kasi pelayanan
10. Operator Desa

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, dan teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan dengan alat bantu kuesioner. Data primer pada penelitian ini mencakup faktor-faktor keberhasilan pengelolaan dana desa, dan sumber-sumber lain PAD serta prinsip-prinsip pemanfaatan dana desa
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait, laporan-laporan, publikasi, jurnal dan pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini mencakup besaran perolehan dana desa, besaran PAD, sumber-sumber PAD, besaran

penggunaan dana desa pada prioritas kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan, dan angka IDM.

#### **D. Pengolahan dan Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis regresi linear. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis tujuan pertama dan keempat, yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian dengan pendekatan ini menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi yang banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, serta desainnya yang bersifat umum sesuai dengan situasi lapangan. Tujuan utama penelitian dengan metode ini adalah untuk mengembangkan konsep-konsep yang akhirnya menjadi teori (Sarwono, 2006).

Analisis data dalam kajian ini melalui proses sebagai berikut:

1. *Reading and coding (data collection)*, yaitu membaca, mempelajari dan menuliskan gagasan dalam data yang diperoleh, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.
2. *Data reduction* atau proses reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang tercatat di lapangan. Dengan melakukan reduksi data diharapkan menghasilkan data yang sesuai dan terklarifikasi secara jelas, tepat guna dan terorganisir.
3. *Data displaying*, yaitu proses dimana data-data yang telah didapat, diproses dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau kalimat, sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan.
4. *Interpreting (conclusion, drawing atau verifying)*, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil analisis dari data yang diperoleh.

Untuk menganalisis tujuan kedua dan ketiga digunakan analisis regresi linear. Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan

memodelkan hubungan di antara variabel-variabel. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n \quad \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y' = nilai pengaruh yang diprediksikan
- a = konstanta atau bilangan harga X = 0
- b = koefisien regresi
- X = nilai variable dependen

Pada tujuan kedua, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa (tingkat kinerja aparat desa, ketersediaan komoditas unggulan, ketersediaan lembaga ekonomi, kondisi geografis) dan prinsip pengelolaan dana desa (transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran), sedangkan variabel terikatnya adalah dana desa. Metode analisis ini menggunakan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*). Dikarenakan variabel yang diteliti diukur dengan menggunakan skala ordinal sehingga dalam pengolahan data data akan diubah menjadi skala interval dengan metode MSI (*Method of Successive Interval*). Adapun bentuk persamaannya yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + e \quad \dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = peruntukkan dana desa
- a = Konstanta
- b1 = Koefisien regresi prinsip transparan
- b2 = Koefisien regresi prinsip akuntabel
- b3 = Koefisien regresi prinsip partisipatif
- b4 = Koefisien regresi prinsip tertib anggaran
- b5 = Koefisien regresi kinerja aparat desa
- b6 = Koefisien regresi komoditas unggulan
- b7 = Koefisien regresi ketersediaan lembaga ekonomi
- b8 = Koefisien regresi geografis
- e = Standart Error
- X1 = Prinsip transparan
- X2 = Prinsip akuntabel

- X3 = Prinsip partisipatif
- X4 = Prinsip tertib anggaran
- X5 = Kinerja aparat desa
- X6 = Komoditas unggulan
- X7 = Ketersediaan lembaga ekonomi
- X8 = Geografis

Pada tujuan ketiga, variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana desa, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Masing-masing variabel yang diteliti berskala rasio. Adapun bentuk persamaannya yaitu :

$$Y = a + bX \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- Y = nilai IDM
- a = Konstanta
- b = Koefisien dana desa
- X = dana desa

Setelah dilakukan uji asumsi klasik selanjutnya dilakukan uji signifikansi sebagai berikut:

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dan untuk mengetahui adanya pengaruh parsial antara variabel dependen dan variabel dependen. Kriteria:1) Jika probabilitas (t-Statistic) variabel X  $< \alpha$  0,05 maka berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. 2) Jika probabilitas (t-Statistic) variabel X  $> \alpha$  0,05 maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

b) Uji Serentak (Uji F)

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dan untuk mengetahui adanya pengaruh secara serentak antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria:1) Jika Probabilitas (F-Statistic)  $< 0,05$  maka seluruh variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. 2) Jika Probabilitas (F-Statistic)  $> 0,05$  maka seluruh variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

c) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji R Square (R<sup>2</sup>) atau koefisien determinasi pada penelitian ini digunakan untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model. Uji ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan variabel dependen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara simultan. Adapun uji R<sup>2</sup> dapat dikriteriakan sebagai berikut: a) jika R square > 0,5 maka kemampuan variabel dependen kuat dalam menjelaskan variabel dependen. b) jika R square < 0,5 maka kemampuan variabel dependen tidak kuat dalam menjelaskan variabel dependen.



## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan dana desa berfokus pada kegiatan pembangunan secara fisik dan belum berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa yang digambarkan dengan pendapatan dan peningkatan status desa, yaitu tingkat kinerja aparat, keadaan geografis, dan penerapan prinsip transparansi.
3. Dana desa kepada desa berpengaruh nyata terhadap peningkatan status desa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya besaran indeks desa membangun di Kabupaten Pesawaran.
4. Kendala dalam pengelolaan dana desa diberbagai tingkat desa adalah jumlah dana yang turun secara berkala menyebabkan keterlambatan kegiatan, sulitnya menggerakkan masyarakat dan kemampuan aparat yang kurang optimal. Tantangan bagi desa, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber lain untuk mendukung kegiatan pembangunan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat dan aparat, diluar kegiatan pembangunan fisik diharapkan memprioritaskan kegiatan pemberdayaan bukan hanya diberikan untuk peningkatan kemampuan aparat desa tetapi juga diberikan

untuk kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat, terutama kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi lokal secara berkelanjutan, misalnya penumbuhan, pengembangan dan pemerliharaan BUMDES serta dukungan terhadap UMKM yang ada didesa.

2. Bagi pemerintah khususnya instansi yang terkait, perlunya sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah, badan yang berwenang lainnya, maupun LSM yang berkepentingan terhadap praktik pengelolaan keuangan desa yang baik, yang sesuai asas serta peraturan perundang-undangan.
3. Bagi peneliti lain disarankan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan meneliti lebih dalam dan beragam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.
4. Terkait kendala pengelolaan dana desa perlu adanya pelatihan dan sosialisai secara intensif terutama bagi pengelola keuangan serta peningkatan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pencariran dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiyanti, Nurul Syaspri. 2015. Strategi Penguatan Partisipasi dan Kapasitas Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekongkang Atas. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Aminah dan Novita Sari. (2018). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Raya)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Aceh.
- Arianto, Bismar dkk. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2(9), 144 – 153.
- Arikunto. 2013. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Banurea, Dina dan Mahmuddin. (2018). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Kabupaten Pakpak Bharat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1), 1-14.
- Damara, Cherrya., Dewangga Nikmatullah dan Indah Nurmayasari. (2015). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kota Bandar Lampung. *JIA*, 3(3), 315-321.
- Daniel, Wayne W. 1990. *Applied Nonparametric Statistics. Second Edition*. PWS-KENT Publishing Company. Boston.
- Dwiningwarni, Sayekti Suindyah dan Ahmad Zuhdi Amrulloh. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 1-20.

- Elvina dan Musdhalifah. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP*, 3(1), 1-9.
- Fhadilah, Ainil. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi. *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 11(1), 125-150.
- Hakim, Mukhtar. 2017. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Cempaka Putih. Klaten.
- Jurniadi dkk. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur . *Jurnal Administrative Reform*, 3(1), 1-13.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Indeks Desa Membangun 2018.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2018.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2019.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020.
- Kementerian Keuangan. Buku Pintar Dana Desa 2018.
- Meutia Inten dan Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8(2), 227-429.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jawa Barat.
- Mutolib, Abdul dkk. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura. Kabupaten Pesawaran. Provinsi Lampung. *JSHP*, 3(1), 10-19.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nugraheni, Rahayu Sapta dkk. (2018). Analisis Dampak Alokasi Anggaran Desa Dan Infrastruktur Desa Pada Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Semarang. *JIEP*, 18(2), 160-173.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penjelasan mengenai Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 60 tentang Dana Desa.
- Permana, Aji Fani. (2018). Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 15-29.
- Putra, Chandra Kusuma dkk. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203-1212.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Peran Masyarakat Dalam Pembangunan*. Multigrafika. Jakarta.
- Saputra, I. W. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. 6 (1): 8-20.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan. Manual & SPSS. Edisi Pertama*. Kencana. Jakarta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor:140/640/SJ perihal Pedoman Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah.
- Sudjarwo, et.all. 2019. *Membangun Desa Kasus di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Syamsi, Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri. 2006. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang PAD
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Utami, Wikan dan Ketut Wahyu. (2019). Pengaruh Pembangunan Desa dan Faktor Faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 36-42.

- Wicaksono, Boedijono dkk. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 4(1), 9 - 20.
- Widiyanto, Mikha A. 2013. *Statistika Terapan: Konsep dan Aplikasi SPSS dalam Penelitian Bidang Pendidikan. Psikologi. & Ilmu Sosial Lainnya*. Gramedia. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. Pemerintah Desa/Marga. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Wijaya, Endra dan Mochamad Firmansyah Roni. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya . *JIKH*, 13(2), 165-184.
- Yudha, Eka Purna. 2018. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang – Banten). *Disertasi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.